



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA  
KOMISI VIII DPR RI  
KE PROVINSI DAERAH BANTEN  
MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2021 – 2022  
TANGGAL 7 JULI 2020**



Sekretariat Komisi VIII DPR RI  
Set\_komisi8@dpr.go.id

**JAKARTA  
TAHUN 2022**



**TIM KUNJUNGAN KERJA  
KOMISI VIII DPR RI**

No.	Nama	Jabatan	DAPIK	Nomor Angg. /Fraksi
1.	MY ESTI WIJAYATI	Ketua TIM	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	A-203/FPDI-P
2.	I KOMANG KOHERI, S.E.	Anggota	LAMPUNG II	A-154/F-PDI-P
3.	MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA	ANGGOTA	BANTEN I	A-225/F-PDI-P
4.	I G N KESUMA KELAKAN, S.T., M.Si.	ANGGOTA	BALI	A-231/F-PDI-P
5.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	ANGGOTA	NTB II	A-235/F-PDI-P
6.	MATINDAS J. RUMAMBI, S.Sos.	ANGGOTA	SULTENG	A 255/F-PDI-P
7.	HJ. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos, MM	ANGGOTA	JABAR IX	A-298/F-PG
8.	Drs. H . HASAN BASRI AGUS, M.M	ANGGOTA	JAMBI	A-275/F-PG
9.	Drs. H. ZAINUL ARIFIN	ANGGOTA	NTB I	A-121/F- GERINDRA
10.	ARDHYA PRATIWI S., S.E., M.Sc.	ANGGOTA	JABAR X	A-093/F- GERINDRA
11.	LUQMAN HAKIM, S.Ag.	ANGGOTA	JATENG VI	A-022/F-PKB
12.	MF. NURHUDA Y	ANGGOTA	JATENG X	A-028/F-PKB
13.	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR	ANGGOTA	JATIM II	A-034/F-PKB
14.	Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, M.M.	ANGGOTA	JABAR III	A-366/F-P NASDEM
15.	Ir. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc.	ANGGOTA	NTB II	A-564/F-P DEMOKRAT
16.	Drs. H. ACHMAD, M.Si	ANGGOTA	RIAU I	A-529/F-P DEMOKRAT
17.	Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	ANGGOTA	JABAR IX	A-438/F-PPS
18.	K.H. MUSLICH ZAINAL ABIDIN	ANGGOTA	JATENG VI	A-468/F-PPP
19.	H. MHD. ASLI CHAIDIR, S.H.	ANGGOTA	SUMBAR I	A-483/F-PAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Umum**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan Spesifik pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-20220.

#### **B. Dasar Kunjungan Kerja**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Keputusan DPR RI Nomor 02 tahun 2018 tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
  - b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
  - c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI pada masa reses.
4. Keputusan rapat Internal Komisi VIII DPR RI

#### **C. Maksud Dan Tujuan**

##### **1. Maksud kunjungan kerja adalah:**

- a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan untuk pembiayaan program pembangunan di daerah.
- c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

##### **2. Tujuan Kunjungan Kerja adalah:**

Mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum dan khusus bidang sosial, dan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.

**BAB II**  
**KINERJA KOMISI VIII DPR RI**  
**BIDANG KESEJAHTERAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) menyatakan, bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.\*) kemudian Pasal 20A ayat (1) menyatakan, bahwa ”Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.\*\*) Untuk menjalankan fungsi tersebut dibentuk alat kelengkapan Dewan, antara lain Alat Kelengkapan Dewan, yaitu Komisi VIII yang bermitra kerja dengan Kementerian Agama R.I, Kementerian Sosial R.I, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Atas dasar landasan konstitusional di atas, Komisi VIII DPR-RI melaksanakan tugas-tugasnya dalam tiga fungsi:

**Fungsi legislasi**

Menyusun RUU Inisiatif, yang menjadi prioritas tahun 2020, yaitu RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

**Fungsi anggaran**

Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Mitra Komisi VIII DPR RI Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kementerian Agama RI	Rp. 66.453.208.486.000,-
2	Kementerian Sosial RI	Rp. 78.256.327.121.000,-
3	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Rp. 252.693.956.000,-
4	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rp. 1.127.245.196.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.146.089.474.759.000,-</b>

1. Dalam rangka meningkatkan target sasaran Tahun 2022, Komisi VIII DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran dari Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI baik yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), *refocusing* dan/atau dari APBN Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	<b>USUL PENAMBAHAN</b>
1	Kementerian Agama RI	Rp. 13.326.879.505.000,-
2	Kementerian Sosial RI	Rp. 25.809.385.200.000,-
3	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Rp. 70.000.000.000,-
4	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rp. 650.335.211.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 39.856.599.916.000,-</b>

2. Dalam rangka penyempurnaan RKA K/L Tahun 2022, Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan Kepala BNPB agar memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:

- a. Meningkatkan proporsionalitas anggaran antara satuan kerja di Kementerian dan Lembaga.
- b. Mendorong pemenuhan hak-hak keuangan bagi para guru honorer, guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan guru *inpassing* baik di sekolah madrasah negeri maupun swasta dengan menyesuaikan kondisi keuangan negara.
- c. Meminta Kementerian Agama RI untuk lebih meningkatkan perhatian kepada madrasah swasta baik sarana maupun prasarananya.
- d. Memastikan penyaluran program bantuan sosial berbasis geografis dan demografis.
- e. Mempercepat realisasi anggaran untuk bantuan anak yatim dari keluarga prasejahtera dan yang terdampak Covid-19.
- f. Meningkatkan sinergi program yang dilaksanakan di daerah berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan Anggota Komisi VIII DPR RI.
- g. Meningkatkan kerjasama Kementerian Agama RI dengan pondok-pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya dalam rangka mensukseskan tujuh program prioritas Kementerian Agama RI Tahun 2022.
- h. Meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan sinergi dengan Kementerian dan Lembaga dalam rangka penanganan dan perlindungan perempuan dan anak.

### **BAB III**

#### **HASIL KUNJUNGAN KERJA**

Ada beberapa program unggulan yang menjadi prioritas nasional, antara lain di Kementerian Sosial ada Prohram Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. Pagu anggaran TA 2021 Rp106.893.023.153.000, dan Pagu Anggaran TA 2022 Rp78.256.327.121.000,- Tahun 2022 anggaran bantuan sosial PKH sebesar Rp28.709.816.300.000, sedangkan besaran anggaran untuk program Bansos Kartu Sembako Rp45.120.000.000.000,- adapun target sasaran 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) durasi 12 Bulan (4 tahap penyaluran)

Bantuan Sosial Kartu sembako Rp45.120.000.000.000,- drengan target sasaran 10 juta Keluarga Penerima Manfaat. Program Keluarga Harapan (PKH) dengan durasi 12 Bulan (4 tahap penyaluran) Kartu Sembako/BPNT dengan target sebanyak 18,8 juta KPM durasi 12 Bulan. Rincian indeks bantuan kondisionalitas bagi Ibu Hamil Rp 3.000.000, bagi Anak Usia Dini Rp3.000.000, bagi siswa Pendidikan SD Rp900.000 bantuan social Pendidikan SMP Rp1.500.000, bantuan sosial bagi siswa Pendidikan SMA Rp2.000.000, bantuan social bagi Lanjut Usia Rp2.400.000 Bagi Penyandang Disabilitas sebesar Rp2.400.000

Komisi VIII DPR RI juga memperjuangkan adanya tambahan anggaran Tahun 2022 untuk program ATENSI anak yatim Rp9.716.692.800.000,- Program Atensi Anak Yatim Target 4,05 juta Anak DURASI 12 Bulan INDEKS BANSOS Rp200.000,- /Bulan/Anak Yatim Usia Sekolah Rp300.000,-/Bulan/Anak Yatim Belum Sekolah

Sedangkan Pagu Anggaran BNPB Tahun 2022 total anggaran **Rp1.127.245.197.000,00** Yang diperuntukan bagi Program Ketahanan Bencana sebesar Rp 838.234.850.000 (Delapan ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu tupiah.

Agenda penting dalam melakukan kunjungan kerja ini, Komisi VIII DPR RI hendak mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN dilaksanakan di Pemda Kab. Lebak khususnya dan

Provinsi Banten secara keseluruhan yang bersinergi dengan Kementerian Sosial dan BNPB.

Selain itu kami, Komisi VIII DPR RI juga hendak menyerap apirasi dari Pemda Kab Sleman dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada saat ini yang menjadi program prioritas nasional yang menjadi perhatian oleh Komisi VIII DPR RI khususnya di pasca pandemi Covid-19, Komisi VIII DPR RI memberi dukungan berbagai kebijakan Kementerian Sosial dan BNPB dan Pemerinah Daerah, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Selain itu juga berbagai dukungan anggaran dalam bentuk dana dekonsentrasi untuk meningkatkan hak-hak dasar masyarakat seperti kebutuhan pokok, pendidikan dan perlindungan sosial secara bertahap semakin besar memberikan nilai mafaat. Di sinilah pentingnya peran Wakil Rakyat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menyusun perencanaan program kerja secara sistimatis dan merealisasikan tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan tepat jumlah.

Ada dua isu aktual yang harus dan segera mendapat respon baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta masyarakat, yaitu:

**Pertama:** dampak pandemi Covid-19 mendorong semua elemen pemerintah dan masyarakat untuk segera bangkit, tumbuh dan berkembang dalam mengatasi berbagai sector pembangunan dan kesejahteraan.

**Kedua,** Menurut ADB: dampak bencana akibat perubahan iklim pada periode 1990-2019 di Asia Pasifik menimbulkan kerugian sekitar USD 1.470 triliun. Sebanyak 2,5 miliar orang terdampak dan satu juta korban meninggal akibat bencana karena perubahan iklim. Indonesia memiliki kerentanan tinggi terkait perubahan iklim karena geografis negara kepulauan dan daerah rentan bencana alam. Berdasarkan data BNPB, terdapat 1.677 kejadian bencana alam dari bulan Januari hingga awal Agustus, dan 40,3% merupakan bencana banjir



Ketidakakuratan data kemiskinan bagi yang berhak menerima bantuan sosial dari program Kementerian Sosial masih menjadi persoalan di sejumlah daerah, tak terkecuali di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Salah satunya data stunting penerima bantuan di Lebak yang terdaftar sebanyak 4000 warga, sedangkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai angka 40.000 warga. Terdapat perbedaan angka 36.000 warga Lebak, sangat jauh dari angka yang terdaftar *by name* dan *by address*. “Mengapa (perbedaan) data tersebut bisa sangat jauh. Ini harus segera dicari daripada akar masalahnya mengapa bisa demikian, pasalnya ini bersangkutan dengan nyawa manusia yang harus diberikan pertolongan,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya bertemu Wakil Bupati Lebak Adi Sumardi, di Gedung Negara Setda Lebak, Banten.

“ Untuk itu saya dan Komisi VIII akan mengundang lintas Kementerian dan Lembaga, di masa sidang berikutnya yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan, dan juga kementerian atau lembaga terkait tentunya Badan Pusat Statistik (BPS), bisa duduk bersama guna mencari titik temu dari pada persoalan data yang akurat dan valid. Kendati demikian persoalan data sudah menjadi persoalan yang sangat klasik hampir 18 tahun masih saja tidak ada titik temu atau jalan keluar. Diharapkan dengan adanya rapat gabungan bisa terpecahkan persoalan tersebut,” harap Hasbi

Ditambahkan politisi PDI-Perjuangan itu, tidak hanya di Lebak, selama Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, persoalan data kemiskinan masih simpang siur. Bahkan tidak hanya data kemiskinan, data disabilitaspun tidak akurat. Saya rasa kesimpangsiuran data tidak terjadi di Lebak saja, namun hampir bisa dikatakan di berbagai daerah. Dengan demikian karena data sangat penting perlu kiranya, saya berharap kita semua mencari jalan keluar agar persoalan keakuratan data yang valid bisa lebih di perbaiki kedepannya sehingga penerima bantuan bisa tersalurkan dan tepat sasaran.

Di sisi lain, masih kata Hasbi, Komisi VIII DPR RI ingin memperbaiki persoalan data tersebut, dengan duduk bersama pihak-pihak terkait. “Atau bisa juga adanya penilaian-penilaian atau kriteria tentang orang-orang miskin yang berhak menerima bantuan sosial, misalnya orang miskin dalam kriteria Kemensos itu seperti apa? Ini sangat perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui apa saja kriteria-kriteria penerima manfaat. Contohnya, kepala rumah tangga yang sudah berkeluarga dengan penghasilan kurang dari Rp600.000 harus masuk data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), baik di Tangerang, Pandeglang, Cilegon dan Serang, termasuk golongan masyarakat yang tidak mampu, dan bisa mendapatkan asistensi dari pemerintah-pemerintah untuk mendapatkan bantuan sosial.

Saya usul atas nama pribadi, menginginkan persoalan data bisa menjadi usulan daerah, dalam arti kata usulan tersebut mencakup, kabupaten dan kota, maupun provinsi. Nanti pada saat pelaksanaan di lapangan bisa diawasi secara bersama pers, pemerintah pusat agar tidak ada keraguan, siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial tersebut. Jika ada temuan-temuan atau bermain tidak jujur di lapangan kita sebut kolusi nepotisme, bisa langsung dilaporkan kepada pihak berwajib,” tekan legislator dapil Banten I tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Lebak Adi Sumardi menjelaskan, saat ini persoalan data yang tidak akurat di Lebak masih saja terjadi, baik *by name* maupun *by address*. Setiap kementerian yang memiliki program yang berkaitan dengan masyarakat pasti memerlukan data dan mereka pasti punya rujukan data sendiri, namun tidak memiliki bank data. “Saya menginginkan Komisi VIII DPR RI bisa membahas terkait data harus ada satu pintu yang bisa mengakomodir data keseluruhan jumlah masyarakat miskin di Indonesia, seperti jika ingin mengetahui data yang valid bisa masuk satu program yang berisi sumber data yang jelas. Dengan demikian keakuratan data yang dihasilkan di seluruh Indonesia bisa sama dan terjamin.

Hadir pada pertemuan tersebut, sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Iyan Kusmadiyahana, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB Bernandus, perwakilan Dinas Sosial dan BPBD Provinsi Banten, serta perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Lebak.

**DAFTAR RINCIAN BANTUAN ATENSI  
KUNKER KOMISI VIII DPR RI DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK**

<b>NO</b>	<b>JENIS BANTUAN</b>	<b>QTY</b>	<b>HARGA</b>	<b>TAX</b>	<b>TOTAL HARGA</b>	<b>TOTAL ALAT BANTU</b>	<b>TOTAL NUTRISI</b>	<b>TOTAL KESELURUHAN</b>
1	MOTOR RODA 3	1	43,800,000		43,800,000	43,800,000	600,000	44,400,000
2	KURSI RODA STANDART	16	1,600,000	200,000	1,800,000	28,800,000	9,600,000	38,400,000
3	KURSI RODA STANDART XL	1	1,800,000		1,800,000	1,800,000	600,000	2,400,000
4	KURSI RODA BAB	6	2,900,000	362,500	3,262,500	19,575,000	3,600,000	23,175,000
5	KURSI RODA CP	8	5,500,000	687,500	6,187,500	49,500,000	4,800,000	54,300,000
6	WALKER KAKI 4	2	1,800,000	225,000	2,025,000	4,050,000	1,200,000	5,250,000
7	TONGKAT KRUK	3	300,000		300,000	900,000	1,800,000	2,700,000
8	KURSI RODA RECLYING	1	3,000,000	375,000	3,375,000	3,375,000	600,000	3,975,000
9	ALAT BANTU DENGAR	1	4,000,000	500,000	4,500,000	4,500,000	600,000	5,100,000
10	KERETA DORONG ANAK	1	700,000		700,000	700,000	600,000	1,300,000
11	KEWIRUSAHAAN	1	5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000
12	NUTRISI SAJA (TANPA ALAT BANTU)	3					1,800,000	1,800,000
						162,000,000	25,800,000	187,800,000

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikianlah laporan ini dibuat menjadi bahan dalam menjangkan fungsi pengawasan di Provinsi Banten

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA TIM**

**MY ESTI WIJAYATI**

